

Judul : Medsos Berperan Ungkap Kasus Kekerasan pada Perempuan
Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Medsos Berperan Ungkap Kasus Kekerasan pada Perempuan

■ RIZKY SURYARANDIKA,
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2021 mendata sebanyak 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Adapun jumlah korban yang terhimpun di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) mencapai 10.368 orang.

"Untuk data kekerasan terhadap perempuan dari 1 Januari-21 Februari 2022 terdapat 1.411 kasus," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan pers, Selasa (8/3).

Bintang mengaku, di tengah banyaknya kasus kekerasan pada perempuan, penggunaan media sosial

ikut berperan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut. Hal ini karena semakin masifnya penggunaan media sosial di masyarakat. "Penggunaan media sosial turut andil untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan pada perempuan," kata Menteri Bintang.

Selain itu, dalam momentum peringatan Hari Perempuan Internasional ini, Bintang menyinggung lingkungan pendidikan tak luput sebagai lokasi kasus kekerasan.

Pada, lingkungan pendidikan yang menjadi tempat belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar. Ia meminta para mahasiswa untuk berani melawan kekerasan terhadap perempuan.

"Agar semakin memperkuat

semangat perjuangan kita semua, terutama para mahasiswa untuk berani melawan kekerasan terhadap perempuan demi terciptanya Indonesia dan dunia yang maju dan setara," ujarnya berpesan.

Pada Desember 2021, Kementerian PPPA merilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021.

Dari survei tersebut, prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan tahun 2021 dialami oleh 26,1 persen perempuan atau 1 dari 4 perempuan usia 15 - 64 tahun selama hidupnya. "Meskipun mengalami penurunan prevalensi kekerasan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat memprihatinkan," katanya.

Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 menggambarkan bahwa anak perempuan lebih banyak mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya dibandingkan dengan anak laki-laki. "Data ini sekaligus mengingatkan kita bahwa perjalanan kita (melawan kekerasan) masih panjang," kata Bintang.

Di sisi lain, DPR mengakui belum bisa membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Rencananya, RUU ini bakal dibahas pada masa reses. Wakil Ketua DPR RI Suifmi Dasco Ahmad beralasan, tidak jadinya pembahasan dalam masa reses karena sampai saat ini Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum menunjuk alat

kelengkapan dewan (AKD) mana yang ditunjuk untuk membahas RUU TPKS.

"Ketika baleb meminta itu (rapat) dicek di dalam bamus, itu belum ada penunjukan kepada AKD mana pun sehingga akan menyalahi aturan ketika belum ada penunjukan secara resmi, lalu diadakan raker dengan pemerintah," kata Dasco.

Dia meminta seluruh pihak bersabar. Pimpinan berjanji akan segera mungkin setelah reses akan mengadakan rapat bamus untuk menunjuk AKD mana yang membahas RUU TPKS. "Kalau kemudian ditunjuk baleb, ya baleb akan segera membahas gitu. Karena sifatnya baleb itu kan setiap rancangan undang-undang pasti akan diharmonisasi oleh baleb, termasuk TPKS," ujarnya. ■ antara ed: agus raharjo